

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan STIM YKPM.
- Adnan, M. F. (2013). Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Humanus*, 12(2), 196-203.
- Agusalim, A. G. (2007). *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agustamar, M. (2014). Restrukturisasi Birokrasi dan Pengembangan Good Governance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang). *Administrasi Publik dan Birokrasi*, 1(1), 1-8.
- Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104.
- Aridhona, N., Baga, L. M., & Affandi, M. J. (2015). Dampak Reformasi Birokrasi pada Perubahan Budaya Organisasi di Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 6(2), 104-116.
- Bratahkusumah, D. S. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daniarsyah, D. (2015). Bureaucratic Political and Neutrality Of Bureaucracy In Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 5(2), 85-94.
- David. (1997). *Strategic Management*. Prentice-Hall International. New Jersey: Inc.
- Djohanputro, & Bramantyo. (2004). *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*. Jakarta: PPM.
- Eddyono, L. W. (2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 1-47.
- Farid, F. F., Musadieg, M. A., & Ruhana, I. (2015). Gambaran Restrukturisasi Organisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 1(2), 1-11.
- Ferdina, M. (2015). Pengaruh Restrukturisasi Organisasi, Kepemimpinan dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 104-115.
- Gartika, D. (2016). Struktur Organisasi Kelembagaan Penanaman Modal di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 71-81.

- Ginting, R. (2015). Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 5(1), 704-712.
- Hadiyanti, R. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 985 – 997.
- Hakim, A. L. (2017). *PR Kota Yogyakarta Agar Benar-benar Berhati Nyaman*. Diambil kembali dari <https://www.kompasiana.com/ariflukman/59d8f488e3f7bc2d48130c92/pr-kota-yogyakarta-agar-benar-benar-berhati-nyaman>: <https://www.kompasiana.com>
- Hanafi, R. (2016). *Pemkot Rampingkan 33 SKPD Jadi 27*. Diambil kembali dari [http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-23/5/134/Pemkot\\_Rampingkan\\_33\\_%20SKPD\\_Jadi\\_27](http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-23/5/134/Pemkot_Rampingkan_33_%20SKPD_Jadi_27): <http://koran-sindo.com>
- Haryono. (2016). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Hukum Dan Ham RI. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), 227 - 242.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studing Publik Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, I. (2017). Organisasi Perangkat Daerah (Kajian Pendekatan System Dynamics di Pemerintah Provinsi Gorontalo). *Ikraith-Humaniora*, 2(2), 32-42.
- Idris, A. (2013). Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 2(3), 352-357.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743-769.
- Jauhari, A., Basri, H., & Shabri, M. (2015). Penerapan Good Government berbasis E-Government dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(3), 57-70.
- Jeddawi, M. (2008). *Reformasi Birokrasi, kelembagaan dan Pembinaan PNS*. 2008.
- Juanda. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah "Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: Alumni.
- Kurniasih, D., A. S., & Setiawan, A. (2016). Penyusunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *JIPSi (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi)*, 6(1), 127-137.

- Kuswandi. (2017). *Mendagri: Tahun 2004–2017, 313 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi*. Diambil kembali dari <https://www.jawapos.com/read/2017/12/11/173981/mendagri-tahun-20042017-313-kepala-daerah-tersangkut-kasus-korupsi>:  
www.jawapos.com
- Lindblom, C. (1984). *The Policy Making Process* (2nd ed.). USA: Yale University.
- Mintzberg, H. (1993). *Structure in Five Designing Effective Organizations*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, F. (2014, Januari-Maret). Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah - Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 69-79.
- Musa'ad, M. (2011). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. *Kajian*, 16(2), 357-385.
- Noor, I. (2010). Inovasi Pemerintahan Daerah: Mengapa Gagal? (Inovasi Pemerintahan Daerah: Mengapa Gagal? *Jurnal Ilmu Politik*, 72-92.
- Nugroho, T. W. (2013). Repositioning And Transformation Of The Organization For Research And Development Of The Ministry Of Law And Human Rights. (N. A. Taufik H. Simatupang, Penyunt.) *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 7(1), 85-104.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Porter, M. E. (1997). *How Competitive Forces Shape Strategy*. (H. & Mintzberg, Penerj.) New Jersey: Inc. Dipetik 1996
- Pramono, A. J. (2016). Analysis Of Influencing Factors Of The Audit Board Of Republic Indonesia's Roles And Capabilities Transformation. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, II, No.2, 175 – 193.
- Pramono, A. J., & Hendharto, H. (2017). Transformation Model Of The Audit Board Of The Republic Of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(2), 91-111.
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Pranata, A., Soeaidy, M. S., & Hanafi, I. (2014). Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10), 1787-1791.
- Robbins, C. S., & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2006). *Perilaku Organisasi* (Bahasa Indonesia ed.). Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 18(1), 14-24.
- Rusdan. (2017). Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayanan Publik. *Sosialita (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 18-28.
- Santoso, R. S. (2015). Identifikasi Kondisi Dan Upaya Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur untuk Reformasi Birokrasi Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(2), 77-88.
- Sedarmayanti. (2000). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, H. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitepu, A., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. *EKSEKUTIF (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan)*, 2(2), 1-12.
- Smith, F. F. (2000). *The partnership handbook*. Canada: Human Resources Development.
- Soewarno, & Handyaningrat. (1991). *Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sondakh, J. (2013). *Fungsi Lokal Investment Regulation dalam Meningkatkan Keuangan Daerah*. Amanna Gappa.
- Suacana, I. W. (2010). Transformasi Otonomi dalam Tata Pemerintahan Desa Mengwi Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Politik*, 137-154.
- Supardi. (2015). The Role Of Leadership And Group Decision Involvement To Organizational Changes. *TARBAWI*, 1(1), 37-48.
- Syafie, I. K. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Rafika Aditma.
- Tanti, E. D., Zauhar, S., & Rochmah, S. (2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 16-21.
- Thaha, R. (2012). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 38-60.

- Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thontowi, J. (2009). Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan. *Jurnal Hukum*, 16(2), 149-168.
- Tori, H. (2011). Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal TAPIs*, 7(12), 92-112.
- Utama, P. (1991). *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Indonesia-Hill-Co.
- Warsito, U. (2003). *Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris seputar Isu-su Kontemporer dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, S. (2010). *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan* (21 ed.). Jurnal Ilmu Politik.
- Werther, W. B., & Davis, J. K. (1996). *Human Resources And personal Management*. United States of America: McGraw-Hill, Inc.
- Wicaksono, K. W., & Ismail, H. H. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 163 - 168.
- Wiyanto, A., & dkk. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Yuliani, F. (2016). Kebijakan Restrukturisasi Organisasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 87-156.
- Yulyana, E. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Persiapan Transformasi Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang. *Jurnal ilmiah Solusi*, 2(5), 95-102.

### **Konstitusi dan Dokumen**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2016

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Tahun 2017

Badan Kepegawaian Kota Yogyakarta Tahun 2018

Biro Organisasi Setda Kota Yogyakarta 2018

RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

RKPD Kota Yogyakarta 2016

Risalah DPRD Kota Yogyakarta 2016

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta 2016